

BAB IV

SANKSI EKONOMI SEBAGAI PILIHAN STRATEGI TIONGKOK

Kebijakan Korea Selatan akan pemasangan THAAD dalam wilayahnya tentu menarik perhatian Negara-negara tetangganya. Kebijakan agresif yang diambil oleh Korea Selatan demi melindungi keamanan negaranya dari potensi ancaman rudal balistik Korea Utara mendapatkan oposisi tidak hanya dalam domestiknya namun juga secara regional, yang mana beberapa Negara menentang kebijakan Korea Selatan tersebut. Negara yang terlihat jelas sangat menentang adanya keberadaan THAAD di Korea Selatan adalah Tiongkok. Diketahui bahwa Korea Selatan dalam operasinya penempatan sistem THAAD di wilayahnya mencoba untuk memilih lokasi yang diyakini sangat strategis agar secara langsung dapat meminimalkan dampak terjadinya perseteruan hubungan diplomatik dengan Negara lain terutama Negara tetangganya, Tiongkok. Akan tetapi usaha Korea Selatan tersebut gagal dikarenakan penempatan sama sekali bukan fokus utama yang menjadi faktor munculnya penentangan Tiongkok terhadap kebijakan THAAD. Demikian berita tentang penempatan sistem THAAD di Korea Selatan tetap memicu ancaman "konsekuensi" dari Tiongkok.

A. Penentangan Tiongkok akan Penempatan THAAD Di Korea Selatan

Mengenai kebijakan Korea Selatan terkait penempatan sistem THAAD dalam negaranya, Tiongkok langsung memberikan tanggapan penentangan terkait kebijakan tersebut. Penentangan ini secara resmi diumumkan melalui konferensi pers oleh kementerian luar negeri Tiongkok, sikap ini dipublikasikan terkait pemberitahuan rencana Korea Selatan dalam penggunaan sistem THAAD yang telah resmi dan siap untuk digunakan pada akhir tahun 2017 (Tempo.co, 2016).

Tiongkok pada awalnya memang diketahui lebih memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara ketimbang Korea Selatan, terlebih lagi Tiongkok terkenal sebagai sekutu kunci Korea Utara. Namun hubungan Tiongkok dengan Korea Selatan semakin membaik dan erat pada seiring waktu. Tiongkok mulai berpindah untuk menjalin hubungan lebih baik dengan Korea Selatan, Korea Selatan pun mulai masuk kedalam orbit pengaruh Tiongkok. Perkembangan hubungan baik tersebut dilihat pada tahun 2014, dimana Presiden Xi yang melakukan perjalanan ke Korea Selatan untuk kunjungan kenegaraan selama dua hari, yang dianggap sebagai penghinaan ke Korea Utara karena itu merupakan pertama kalinya seorang presiden Tiongkok mengunjungi Korea Selatan sebelum melakukan perjalanan ke Korea Utara sejak 1992 ketika kedua negara menormalkan hubungan diplomatik (Yonhap News, 2014).

Kemudian, Presiden Park yang menghadiri perayaan parade militer besar-besaran di Beijing untuk memperingati 70 tahun berakhirnya Perang

Dunia II pada tahun 2015 lalu. Selama acara tersebut, dia berdiri menonjol di samping Presiden Xi Jinping. Tidak hadir dalam peringatan tersebut adalah pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Sebelumnya, Tiongkok dan Korea Selatan telah secara resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas (Tiezzi, *It's Official: China, South Korea Sign Free Trade Agreement. The Diplomat*, 2015). Ditahun yang sama pula, Korea Selatan memutuskan untuk bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank yang dipimpin Tiongkok, yang secara umum dianggap sebagai upaya Tiongkok untuk meningkatkan pengaruh ekonominya dengan menciptakan penyeimbang dengan Bank Pembangunan Asia yang dipimpin Amerika (Christine Kim, 2015).

Hubungan baik kedua Negara yang terus dibina membuat Tiongkok semakin jauh dengan Korea Utara ditambah lagi uji coba rudal balistik yang kerap dilakukan oleh Korea Utara ditahun 2016, semakin mengubah pandangan Tiongkok atas hubungan kedua Negara. Tiongkok juga merasa terancam dengan perkembangan pesat kekuatan nuklir Korea Utara yang kemudian menentang pengembangan nuklir Negara tersebut. Dilihat dari Tiongkok yang menunjukkan rasa kesalnya terhadap percobaan rudal balistik Korea Utara dengan memblokir impor batubara dari Korea Utara, yang menjadi pukulan besar bagi perekonomian Korea Utara (Taylor, 2017). Walau memiliki rasa kekhawatiran yang sama dengan Korea Selatan akan aktivitas rudal balistik Korea Utara, Tiongkok tidaklah setuju dengan kebijakan Korea Selatan untuk menggunakan Sistem

pertahanan THAAD dalam negaranya. THAAD yang diklaim Korea Selatan sebagai sistem untuk melindungi keamanan Negaranya dari adanya ancaman rudal dari Korea Utara dipandang berbeda oleh Tiongkok. Akibatnya terjadilah perselisihan antara Tiongkok dengan Korea Selatan yang mengakibatkan terjadinya persetujuan hubungan diplomatik kedua Negara.

Presiden Xi Jinping yang bertemu dengan Presiden Park Geun Hye pada acara Konferensi Tingkat Tinggi *Group of Twenty* atau KTT G-20 di Tiongkok telah menyampaikan penolakannya terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan. Menurut Xi Jinping, penempatan THAAD dapat memberikan dampak buruk pada stabilitas keamanan. Tidak stabilnya kawasan dan dapat membawa pengaruh buruk bagi negara Tiongkok (Maulana, 2016). Ada beberapa poin alasan mengapa Tiongkok mengklaim demikian, diantaranya adalah;

1. THAAD Sebagai Strategi AS Untuk Memperluas Kekuasaannya di Asia Timur

Fakta bahwa, melalui Kebijakan Korea Selatan untuk menempatkan Sistem THAAD, yang merupakan sistem pertahanan terminal milik Amerika Serikat akan membuat Korea Selatan memiliki komitmen jangka panjang dengan Amerika Serikat, yang mana hal tersebut dapat memperkuat kehadirannya di wilayah Asia Timur. Fakta tersebut, menjadi salah satu alasan Tiongkok menentang kebijakan THAAD tersebut. Tiongkok yang menganggap Amerika Serikat sebagai saingannya dalam

global power melihat bahwa adanya THAAD di Korea Selatan bukan hanya sekedar langkah defensif Amerika Serikat untuk membantu Korea Selatan mempertahankan diri dari ancaman Korea Utara namun juga merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di Asia. Amerika Serikat yang juga dalam mengukuhkan posisinya untuk memiliki *power* di Asia memang melihat Tiongkok sebagai salah satu tantangannya. Demikian dengan adanya pengaruh Amerika Serikat yang lebih luas di Asia Timur, dipandang oleh Tiongkok akan digunakan oleh Amerika Serikat untuk membatasi pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut (Swaine, 2017).

Pada bulan Maret 2017, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lu Kang mengatakan, “Penempatan sistem THAAD di Korea Selatan adalah bagian dari langkah Amerika Serikat untuk meningkatkan sistem pertahanan rudal globalnya dan memiliki pengaruh pada perdamaian dan stabilitas di Asia Timur.” (China’s Ministry of Foreign Affairs, 2017). Amerika Serikat yang menempatkan sistem THAAD miliknya di Korea Selatan, sehingga dapat meningkatkan jaringan pertahanan sistem anti-rudal globalnya bagi Tiongkok merupakan salah satu bagian dari rencana Amerika Serikat dalam ambisinya untuk menempatkan pengaruh besar di Asia Timur. Sistem THAAD ini berfungsi sebagai perluasan arsitektur pertahanan rudal sekutu dengan Amerika Serikat di wilayah tersebut, suatu pembangunan yang Tiongkok anggap dapat membatasi kekuatannya di Asia Timur. Kemudian secara

tidak langsung merupakan langkah lain dalam upaya Amerika Serikat secara keseluruhan untuk mengendalikan Tiongkok. Tiongkok juga melihat melihat THAAD sebagai tindakan strategis oleh Amerika Serikat yang dapat merusak keamanan di Asia Timur. Kebijakan penempatan sistem THAAD Korea Selatan dapat menempatkan fasilitas militer milik Negara sekitarnya dalam jangkauan radar AS. Kebijakan ini secara eksplisit menghubungkan sistem THAAD ke dalam jaringan pertahanan global Amerika Serikat yang tidak langsung dapat membuat Amerika Serikat memiliki kemampuan yang dapat merusak stabilitas keamanan di Asia Timur (Swaine, 2017).

Tiongkok juga mengatakan bahwa adanya Komitmen jangka panjang Korea Selatan dengan Amerika Serikat melalui kebijakan THAAD ini akan memberikan lebih banyak keuntungan terhadap Amerika Serikat ketimbang Korea Selatan. Dengan alasan untuk memperkuat sistem pertahanan Negeranya dari ancaman nuklir Korea Utara, THAAD sendiri hanya memberikan pertahanan minimal terhadap kekuatan rudal balistik milik Korea Utara. Para Ahli Tiongkok berpendapat bahwa THAAD dirancang untuk mencegat rudal ketinggian tinggi, yang tidak akan efektif terhadap rudal jarak pendek dan taktis Korea Utara yang kemungkinan akan digunakan melawan Korea Selatan (Swaine, 2017). Ironi lagi penempatan THAAD tidak dapat melindungi wilayah IbuKota Korea Selatan, Seoul. Seoul terletak lebih dari 200 kilometer dari lokasi penempatan sistem yang diusulkan dan dengan demikian jauh melampaui

zona perlindungan yang disediakan oleh sistem THAAD. Tetapi akan cukup untuk melindungi pasukan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Seongju. Saat THAAD membentuk elemen inti dari program pertahanan berlapis-lapis Amerika Serikat di wilayah tersebut, dan juga diarahkan untuk mempertahankan pasukan AS disana (Kim, 2016).

Kemudian, Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, Lu Kang menekankan bahwa THAAD sama sekali tidak akan membantu mencapai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan masih kurang berkontribusi pada resolusi untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara (Shinha, 2018). Adanya THAAD di Semenanjung Korea malah akan berakibat kepada perlombaan senjata di kawasan, menghambat proses pelucutan nuklir serta meningkatkan ketegangan di kawasan (Ethan Meick, 2017, pp. 5-6). Tiongkok mengatakan bahwa, Korea Utara bisa saja memandang keputusan untuk mengerahkan THAAD sebagai sebuah provokasi dan tindakan agresi dari Korea Selatan. Yang mana THAAD akan menyebabkan Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir yang lebih maju. Dibuktikan dari satu hari setelah pengumuman Kebijakan THAAD, Korea Utara langsung melakukan percobaan rudal balistik berbasis kapal selam bernama Pukkuksong-1 (K.J. Kwon, 2016). Diikuti oleh tiga rudal jarak pendek yang ditembakkan enam hari setelah pengumuman dan dua rudal jarak menengah lainnya pada awal Agustus 2016 (Chung, 2017).

2. Kemampuan Radar THAAD Terhadap Keamanan Negara Tiongkok

Selain sebagai strategi Amerika Serikat untuk memperluas posisinya di Asia Timur dan membatasi pengaruh Tiongkok, adanya sistem THAAD di wilayah Korea Selatan yang merupakan Negara tetangganya juga ditakuti Tiongkok dapat digunakan oleh Amerika Serikat untuk memata-matai wilayahnya sehingga dapat mengancam kedaulatan dan keamanan Negara Tiongkok. THAAD dicurigai dapat mengintip jauh ke dalam wilayah Tiongkok dan mengekstraksi informasi militer yang sensitif yang dapat menurunkan keamanan Tiongkok.

Secara keseluruhan yang paling Tiongkok khawatirkan dari kemampuan yang dimiliki THAAD adalah kapasitas radar AN/TPY-2 dengan kemampuan frekuensi X-bandnya. Dalam dunia militer, kemampuan radar menjadi sesuatu yang penting karena radar dapat menunjukkan aktivitas-aktivitas dari alat-alat militer. Maka dari itu, Tiongkok percaya bahwa radar canggih sistem THAAD akan memberikan Amerika Serikat dan Korea Selatan kemampuan tidak hanya untuk melihat rudal balistik dari Korea Utara, tetapi untuk berpotensi melihat jauh ke dalam Tiongkok untuk memantau kegiatan militernya. Dengan estimasi jarak hingga 2000km, sistem radar THAAD dapat mengumpulkan data-data dikisaran jarak tersebut yang dimana mencakup sebagian besar wilayah Tiongkok (Chris Inton, 2017).

Tiongkok khawatir bahwa radar AN/TPY-2 yang ditempatkan dibekas lapangan golf Lotte Group di Gyeongsangbuk-do, Seoungju akan

memberikan wawasan pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Amerika Serikat mengenai rahasia kemampuan dan pengembangan rudal balistik Tiongkok yang sensitive. Kekhawatiran Tiongkok akan bahaya radar AN/TPY -2 ini sudah lama dirasakan oleh Tiongkok, karena THAAD bukanlah pertama kalinya Amerika Serikat menempatkan sistem anti misil dengan kemampuan radar AN/TPY dekat dengan wilayah Tiongkok. Amerika Serikat sudah memiliki dua instalasi radar AN/TPY-2 di Jepang, di Situs Komunikasi Kyogamisaki di Prefektur Kyoto dan Shariki di Prefektur Aomori. Dengan adanya instalasi ketiga radar AN/TPY-2, terlebih lagi dalam wilayah Korea Selatan akan semakin meningkatkan resolusi pengumpulan data-data terkait kepentingan militer Tiongkok oleh Amerika Serikat (Panda, 2017).

Bagi Tiongkok, dengan estimasi jarak deteksi dari radar THAAD wilayah bagian timur dan utara Tiongkok akan menjadi wilayah yang masuk dalam cakupan radar THAAD, sementara wilayah ini merupakan wilayah yang strategis sebagai lokasi dari sistem pertahanan dan penempatan perangkat-perangkat militer dari Tiongkok. Wilayah-wilayah seperti Nanjing dan Shenyang merupakan salah satu daerah yang menjadi daerah cakupan radar dari THAAD sementara daerah tersebut merupakan bagian dari penempatan-penempatan perangkat militer dari Tiongkok, bagian dari angkatan darat, udara, laut, bahkan pengembangan misil ada pada daerah tersebut (Habiburrahman, 2017, p. 7). Kemudian wilayah gurun Gobi juga merupakan tempat Tiongkok aktif melakukan percobaan

misil miliknya dan merupakan wilayah yang sensitif bagi jarak dari percobaan misilnya, dengan estimasi jarak radar AN/TPY-2 dengan X-band-nya maka wilayah ini juga akan termasuk ke wilayah yang menjadi bagian dari jangkauan radar THAAD (Panda, 2017).

Kemampuan dari radar THAAD dari segi militer akan membuat posisi Tiongkok melemah terhadap Amerika Serikat, karena dengan adanya cakupan jarak yang dapat di jangkau oleh radar AN/TPY-2 tersebut, dapat mendeteksi posisi dari ICBM milik Tiongkok yang di kembangkan di beberapa daerah yang diyakini berada di kawasan jangkauan radar AN-TPY-2.

Gambar 1: Jangkauan Radar THAAD



Sumber:<http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/SOUTHKOREA-THAAD/0100403L07J/index.html>

Demikian Radar THAAD diperkirakan akan dengan mudah melacak persenjataan milik Tiongkok secara langsung sehingga dapat mencuri rahasia militer dan kekuatan senjata milik Negara Tiongkok. Tiongkok diketahui sejak awal memang tidak pernah mengungkapkan ukuran kekuatan nuklirnya juga perkembangan kekuatan militernya dalam Negara, sehingga Tiongkok tentunya tidak menginginkan jika aktivitas militernya diketahui secara detail oleh negara lain. Hal ini juga disampaikan Wang Yi dari kementerian luar negeri Tiongkok pada saat wawancara dengan Reuters yaitu:

“The coverage of THAAD missile defense system, especially the monitoring scope of its X-band radar, goes far beyond the defense need of the Korean Peninsula. It will reach deep into the hinterland of Asia, which will not only directly damage Tiongkok’s strategic security interests, but also do harm to the security interests of other countries in this region.”

(Habiburrahman, 2017, p. 7)

Song Zhongping, seorang pakar militer, juga mengatakan bahwa radar X-band merupakan ancaman utama adanya THAAD di Korea Selatan bagi Tiongkok karena radar THAAD dapat memonitor "aktivitas militer yang dilakukan Tiongkok, termasuk peluncuran rudal balistik milik Negara yang dilakukan untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal milik Negeranya sendiri. Hal tersebut secara serius akan merusak kemampuan

pengecehan rudal milik Tiongkok." (Sheng, 2017). Li Bin, seorang profesor di Universitas Tsinghua, juga menjelaskan bahwa radar milik THAAD, ketika diposisikan di Korea, cukup kuat untuk melacak beberapa ICBM milik Tiongkok selama penerbangan, merusak pengecehan nuklir Tiongkok dengan mengumpulkan data penting tentang hulu ledak nuklir Tiongkok yang tidak dapat diperoleh Amerika Serikat dari sumber lain. Radar THAAD yang ditempatkan dalam Korea Selatan akan berada dalam posisi di mana ia dapat melihat bagian belakang hulu ledak milik Tiongkok yang terbang di bagian timur laut Tiongkok ketika dikerahkan untuk memantau aktivitas rudal balistik dari Korea Utara. Sistem THAAD memiliki jangkauan yang cukup besar untuk mendeteksi rudal balistik milik Tiongkok dalam dua situasi (Bin, 2017).

Dalam situasi pertama, Tiongkok meluncurkan uji coba rudal balistik dari bagian timur laut Tiongkok ke arah Barat. Tiongkok membutuhkan uji coba rudal semacam itu untuk mengembangkan tindakan pengecehan pertahanan rudal Negaranya. Rudal akan melepaskan hulu ledak dan beberapa umpan setelah fase boost-nya. Radar dari bagian depan hulu ledak dan umpan biasanya dirancang agar tidak dapat dibedakan atau berbeda secara acak, sehingga mereka dapat menipu radar pertahanan rudal di depannya. Sama halnya dengan radar bagian belakang hulu ledak yang juga memiliki beberapa perbedaan sistematis ketika mereka dilepaskan dari rudal. Demikian, Radar THAAD yang memang berfungsi untuk memantau aktivitas uji coba rudal balistik Korea Utara juga dapat digunakan untuk

memata-matai uji coba rudal balistik Tiongkok untuk memahami karakteristik hulu ledak dan umpan yang dikeluarkan oleh rudal milik Tiongkok. Dalam situasi kedua, Apabila suatu saat Amerika Serikat membidik Tiongkok dengan kekuatan nuklirnya. Tiongkok yang kemudian meluncurkan rudal balistiknya untuk pembalasan nuklir terhadap Amerika Serikat. THAAD dapat menjadi senjata bagi Amerika Serikat untuk melacak rudal milik Tiongkok pada tahap awal dan mentransfer data lintasannya ke sistem pertahanan rudal balistik milik Amerika Serikat. Ini akan memungkinkan pencegat pertahanan rudal Amerika Serikat memiliki lebih banyak waktu dan lebih banyak upaya untuk mencegat rudal balistik milik Tiongkok (Bin, 2017).

Prof. Lin Bin kemudian juga mengatakan bahwa, Tiongkok memang harus khawatir dan menaruh perhatian terhadap kemampuan radar THAAD tersebut, karena radar dapat beroperasi baik dalam "mode terminal" untuk melacak rudal balistik musuh dalam fase penurunan penerbangan, atau "mode berbasis-maju" untuk memantau rudal balistik dalam fase boost penerbangan. Bisa dibayangkan, itu menjadi misalokasi fungsional sistem THAAD, yang mana posisi THAAD di Korea Selatan diyakininya dapat menjadi sumber informasi yang potensial bagi Amerika Serikat terhadap kemampuan nuklir Tiongkok. Demikian sistem THAAD yang dikerahkan Amerika Serikat di Korea Selatan dengan menggunakan ancaman nuklir dari Korea Utara untuk membidik Tiongkok pada dasarnya (Bin, 2017).

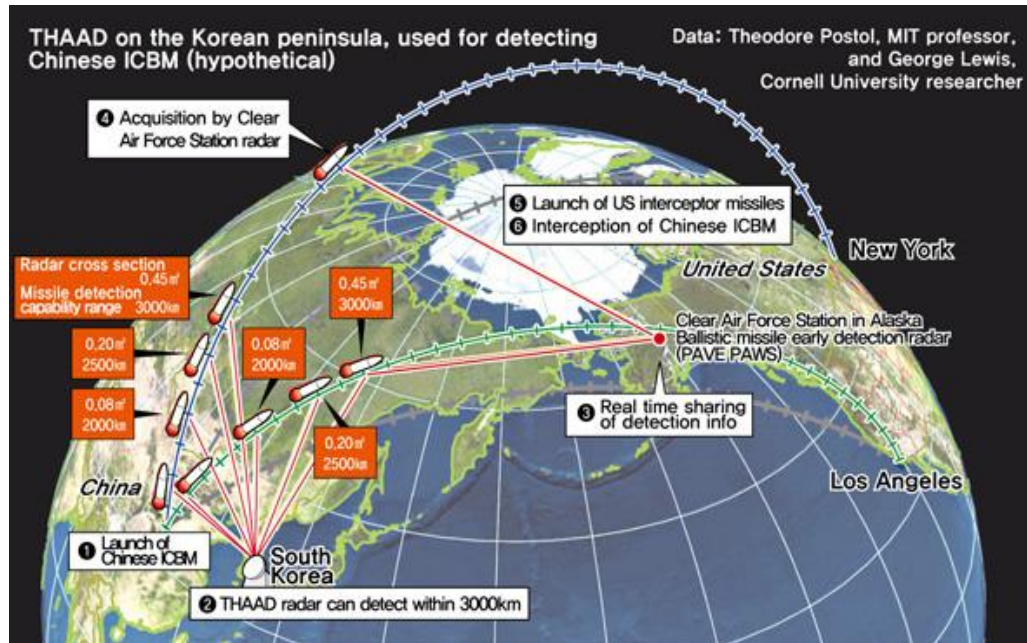
Mendengar klaim dari pihak Tiongkok tersebut, pihak Korea Utara dan Amerika Serikat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa THAAD hanya akan digunakan melawan Korea Utara, misi THAAD di Korea Selatan hanya dirancang untuk melawan rudal balistik dan ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Korea Utara bukan untuk membidik Tiongkok. Dalam pernyataan Korea Selatan dan Amerika Serikat juga menjelaskan bahwa, baterai milik THAAD akan ditempatkan dalam mode terminal, sehingga membuatnya tidak dapat mendeteksi ICBM milik Tiongkok. Selain itu, Lokasi peluncuran THAAD di Korea Selatan secara teoritis memang memungkinkan dapat menegat rudal yang ditembakkan pihak Tiongkok dari Tonghua, karena mengikuti lintasan yang sama dengan yang dari Korea Utara, tetapi tidak dengan rudal yang ditembakkan dari Dengshahe, Laiwu, dan Hanchang (Bin, 2017).

Namun, laporan Pentagon telah menunjukkan bahwa adanya kemungkinan untuk mengubah sistem ke mode berbasis maju hanya dalam delapan jam (Institute of Security & Development Policy, 2017, p. 6). Begitu berada dalam mode ini, jangkauan radar akan meningkat hingga 3.000 kilometer, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi rudal balistik Tiongkok yang menuju ke Amerika Serikat. Meskipun sistem THAAD tidak akan dapat menegat rudal balistik Tiongkok dalam fase peningkatan dan jarak menengah, radar THAAD dapat mengumpulkan informasi yang kemudian dapat ditransfer ke radar peringatan dini di *Clear Air Force Station* di Alaska, Amerika Serikat. Dengan kata lain, hal Ini akan

memungkinkan rudal balistik Tiongkok untuk dilacak dari jarak yang lebih jauh dari yang ada saat ini. Fakta bahwa dua radar THAAD telah ditempatkan di Jepang sudah menjadi alasan kekhawatiran bagi Tiongkok, tetapi sistem tambahan di Korea Selatan memungkinkan lebih banyak deteksi yang tepat, karena radar berada 1.000 kilometer lebih dekat ke perbatasan wilayah Tiongkok (Park Hyun, 2015).

Wu Riqiang seorang ahli nuklir dari Universitas Renmin di Beijing mengatakan bahwa, kapasitas jangkauan maksimal radar THAAD akan sangat berpengaruh bagi posisi Negara Tiongkok, Wu menambahkan dengan kapasitas yang dimiliki Tiongkok saat ini akan menyulitkan bagi negaranya untuk memberikan perlawanan jika terjadi situasi yang tidak diinginkan, Kemudian Wu juga menegaskan bahwa yang membuat Tiongkok khawatir pada dasarnya bukanlah tujuan dari ditematkannya THAAD di Korea Selatan, seperti yang dijelaskan Amerika Serikat bahwa hal tersebut dilakukan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman nuklir Korea Utara, selama kapasitas THAAD mampu membahayakan keamanan Tiongkok, maka Tiongkok sudah seharusnya khawatir terhadap pengadaan THAAD di Korea Selatan (Buckley, 2017).

Gambar 2: THAAD di Korea Selatan dapat digunakan untuk bertahan melawan serangan Tiongkok terhadap AS.



Sumber:http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/693913.html

Pernyataan Korea Selatan yang menegaskan bahwa THAAD didasari oleh kekhawatiran akan serangan dari Korea Utara tidak lantas membuat Tiongkok setuju dengan penempatan THAAD di Korea Selatan. Tiongkok masih tetap tegas menolak penempatan THAAD dengan alasan keamanan. Bahkan secara tersirat Tiongkok menyatakan bahwa adanya THAAD dapat mengganggu hubungan baik yang tercipta selama ini antara Korea Selatan dan Tiongkok.

Duta Besar Tiongkok Qiu Guohong, terkait penentangan Tiongkok terhadap kebijakan THAAD Korea Selatan menegaskan bahwa hubungan

baik yang dibangun kedua Negara merupakan pencapaian yang positif namun dengan keputusan Korea Selatan untuk menempatkan THAAD di negaranya akan menghadirkan masalah bagi kedua Negara, Qiu mengaskan bahwa keputusan tersebut dapat secara seketika menghancurkan hubungan Tiongkok dan Korea Selatan. Secara khusus, Qiu menjelaskan bahwa kekhawatiran Tiongkok didasari dari tingkat control yang dimiliki Amerika Serikat atas sistem THAAD. Dia mengatakan Tiongkok akan mempercayai Korea Selatan untuk membatasi fungsi THAAD agar tidak menargetkan Tiongkok, tetapi dengan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Tiongkok dengan juru bicara Hua Chunying terkait kebijakan THAAD demi keamanan Korea Selatan mengatakan bahwa, "Pihak Tiongkok memahami kekhawatiran keamanan Korea Selatan yang wajar, tetapi tidak ada negara yang dapat mengejar kepentingan keamanannya sendiri dengan mengorbankan keamanan Negara lain." (Tiezzi, China Warns THAAD Deployment Could Destroy South Korea Ties 'in an Instant'. The Diplomat, 2016). Pernyataan - pernyataan bahwa sistem THAAD di Korea Selatan akan memberikan ancaman terhadap keamanan negara Tiongkok, selain itu hal tersebut juga tidak akan memberikan solusi bagi situasi keamanan Korea Selatan akan ancaman nuklir Korea utara, membuat pihak Tiongkok mendesak pihak Korea Selatan untuk lebih mempertimbangkan dalam memutuskan apakah THAAD merupakan jalan keluar dari masalah keamanan yang ditimbulkan oleh aktivitas nuklir Korea Utara.

B. Sanksi Ekonomi Sebagai Pilihan Strategi Tiongkok

Walau dengan adanya desakan dan ketidaksetujuan Tiongkok terhadap Kebijakan THAAD, yang mana Tiongkok telah melakukan protes, menunjukkan oposisi yang kuat terhadap kebijakan tersebut sejak awal di umulkannya kebijakan THAAD oleh Korea Selatan dengan Amerika Serikat, Korea Selatan tetap teguh dengan keputusannya untuk menempatkan sistem THAAD dalam Negaranya. Korea Selatan telah memberikan prioritas utama untuk denuklirisasi Korea Utara dengan memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat yang juga menginginkan hal yang sama. Korea Selatan yang diwakili oleh juru bicara presiden Korea Selatan, Jung Youn-ku mengatakan bahwa menyebarkan THAAD merupakan masalah yang telah diputuskan sesuai dengan keamanan dan kepentingan nasional Negara, sehingga Korea Selatan tidak berencana untuk membatalkan kebijakan tersebut (Tiezzi, China Warns THAAD Deployment Could Destroy South Korea Ties 'in an Instant'. The Diplomat, 2016). Mendengar respon dari Korea Selatan yang tetap dengan keputusannya akan THAAD, Tiongkok pun pada akhirnya mengancam akan mengambil tindakan untuk membalas Korea Selatan jika Korea Selatan tidak segera membatalkan kebijakannya dalam menggunakan sistem THAAD tersebut.

THAAD yang berpotensi mengancam keamanan Negara Tiongkok, yang mana keamanan nasional merupakan merupakan salah satu fokus utama kepentingan nasional Tiongkok pun mendorong Tiongkok sebagai Negara yang sangat membela kepentingannya untuk mengambil "langkah tegas dan

perlu" untuk melindungi kepentingan keamanannya dan Korea Selatan akan harus menanggung semua konsekuensi jika tetap teguh dengan kebijakan THAADnya. Dengan adanya kapasitas dan kemampuan yang dimiliki Tiongkok, Tiongkok dapat memberi penekanan terhadap Korea Selatan, dan mempengaruhi Negara tersebut untuk membatalkan kebijakannya terhadap penempatan sistem THAAD dalam Negara. Pemerintah Tiongkok kemudian memilih menggunakan instrumen ekonomi dalam bentuk sanksi ekonomi sebagai strateginya untuk mencegah, menunda, dan membalikan kebijakan THAAD miliknya.

1. Pengertian Sanksi Ekonomi

Sanksi Ekonomi merupakan salah satu fitur penting dalam politik internasional, yang mana merupakan respon Negara terhadap ancaman dari lingkungan internasional. Para pakar mendefinisikan sanksi ekonomi sebagai sebuah tindakan penekanan Negara terhadap kebijakan Negara lain. David Baldwin secara sederhana mendefinisikan sanksi ekonomi sebagai "penggunaan kebijakan perdagangan atau finansial untuk mempengaruhi Negara lain." (Baldwin, 2000, p. 82). Dalam pengertian yang sama, Karin Fierke mendefinisikan sanksi ekonomi sebagai "hukumann yang dikenakan dengan tujuan untuk memaksa Negara untuk mengubah kebijakannya." (Fierke, 2005, p. 105). Daniel Drezner juga mengemukakan definisi sanksi ekonomi yang lebih spesifik yaitu, sebagai "ancaman atau tindakan oleh Negara, yang disebut sebagai Negara pengirim, untuk mengganggu aktivitas ekonomi Negara lain, disebut sebagai Negara target, kecuali jika Negara

target tersebut tunduk terhadap keinginan politik tertentu Negara pengirim.” (Drezner, *The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations*, 1999, p. 2). Intinya, sanksi ekonomi merupakan kebijakan menghukum Negara lain karena adanya ketidaksesuaian antara tindakan yang dilakukan suatu Negara dengan harapan dari Negara lain, yang kemudian dijadikan sebagai strategi untuk mempengaruhi Negara tersebut agar megubah kebijakannya.

Sanksi ekonomi dalam politik internasional merupakan salah satu instrumen dalam politik luar negeri suatu Negara, yang mana digunakan Negara untuk menekan Negara lain supaya Negara tersebut patuh terhadap kehendak Negara yang memberi sanksi. Alh`asil sanksi ekonomi adalah cara ekonomi untuk mencapai tujuan politik suatu negara. Pengertian ini sejalan dengan David Baldwin yang juga berpendapat bahwa, sanksi ekonomi lebih dipahami sebagai cara daripada tujuan politik luar negeri. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, sanksi ekonomi memperlihatkan keinginan suatu Negara untuk mencampuri proses pembuatan kebijakan di Negara lain, yang umumnya disertai dengan kecaman diplomatik tanpa harus melibatkan kekuatan militer Negara (Hufbauer, 2017, p. 5). Jadi secara garis beras, sanksi ekonomi dianggap sebagai upaya intervensi tidak langsung suatu Negara dalam rangka mengubah kebijakan Negara lain.

Dalam iklim globalisasi sekarang, Negara cenderung menggunakan instrumen politik luar negeri yang lebih aman untuk kepentingan nasionalnya. Sanksi ekonomi sebagai instrumen dianggap sebagai strategi

yang moderat suatu Negara untuk membuat Negara berkompromisi dengan hendak Negara lain. Dikatakan moderat disini karena sanksi ekonomi sejenis komunikasi ancaman namun tidak melibatkan kekerasan atau kekuatan militer sehingga lebih aman untuk digunakan. Apabila dibandingkan dengan instrument kekerasan yang menggunakan kekuatan militer Negara, sanksi ekonomi merupakan pilihan yang lebih bijak karena kekerasan hanya akan menciptakan bencana yang lebih besar ketimbang mendapatkan tujuan yang diinginkan (Rosyidin, 2016, p. 44).

Selain merupakan instrumen politik luar negeri yang aman untuk digunakan, sanksi ekonomi juga merupakan '*smart sanctions*'. Karena sanksi ekonomi sendiri tidak begitu menguras biaya besar terhadap Negara pengirim. tidak hanya efektif untuk memberi penekanan terhadap Negara target, sanksi ekonomi juga bisa secara langsung menjadi strategi Negara pengirim untuk memperbesar atau memperlihatkan kekuasaannya dan menjamin keamanan Negara pengirim karena dirancang untuk meningkatkan resiko ketidakpatuhan Negara target sambil menghindari dampak destruktif (Drezner, 2003, p. 107). Sebagaimana yang dikatakan oleh Morgenthau bahwa, sanksi ekonomi bisa dipandang sebagai upaya Negara untuk menunjukkan bahwa ia memiliki status yang tidak boleh diremehkan (Rosyidin, 2016, p. 41).

Sebagai sebuah instrumen politik luar negeri, sanksi ekonomi terdiri dari beberapa bentuk antara lain berupa pembatasan impor atau ekspor, pembatasan investasi, yang termasuk didalamnya arus modal, dan bahkan

bisa juga pelarangan investasi di Negara yang dikenai sanksi (Rosyidin, 2016, p. 7). Kemudian Sebagaimana yang ditulis oleh Gary Hufbauer, dalam implikasinya sanksi ekonomi mengandung tiga pesan yang berbeda kepada pihak yang berbeda di Negara target: “Kepada Negara target, sanksi mengirim sinyal bahwa Negara pemberi sanksi tidak menoleransi suatu tindakan atau kebijakan Negara target; kepada Negara yang menentang kebijakan yang sama, mengirim sinyal untuk mencari dukungan, dan kepada publik domestik, sanksi mengirim sinyal bahwa pemerintah akan menjaga kepentingan nasional.” (Hufbauer, 2017, p. 7).

Dalam sejarah digunakannya sanksi ekonomi, indicator utama keberhasilan sanksi ekonomi adalah tercapainya tujuan dan harapan Negara pemberi sanksi. Tujuan dan harapan tersebut yang biasanya menyangkut perubahan kebijakan, baik kebijakan domestic maupun kebijakan luar negeri Negara lain. Apabila Negara target mengubah kebijakannya sesuai dengan kehendak Negara pengirim sanksi, maka tujuan dan harapan tersebut tercapai. Jika tidak, dalam arti Negara target tetap bersikeras bertahan dengan kebijakannya atau justru melawan maka tujuan dan harapan tersebut tidak tercapai. Adapula dilain kasus, apabila Negara target memberika opsi lain yang menguntungkan Negara pemberi sanksi tanpa harus mengubah kebijakannya maka, sanksi ekonomi berhasil namun tidak seratus persen.

Namun kebanyakan analis hubungan internasional mengatakan bahwa, sanksi ekonomi adalah strategi yang berhasil dalam mencapai tujuannya.

Survei yang dilakukan dengan sangat terperinci oleh Gary Hufbauer, menemukan bahwa dari 115 kasus sanksi ekonomi yang ditelitinya, 34% dikategorikan berhasil (Hufbauer, 2017, p. 158). Alasan utama keberhasilan sanksi ekonomi adalah tidak ada Negara yang mampu bertahan dibawah kondisi tekanan. Tekanan yang tercipta dari pemberian sanksi ekonomi akan membuat Negara tidak berdaya. Ketidakberdayaan itu pada gilirannya akan membuat pemerintah Negara target bersedia mengubah kebijakannya sesuai dengan tuntutan Negara pengirim sanksi. Terlebih lagi adanya saling ketergantungan ekonomi dalam iklim globalisasi, yang mana semakin besar ketergantungan suatu Negara menjadikan sanksi ekonomi sebagai pilihan yang efektif (McLean, 2010).

Sanksi ekonomi juga cenderung lebih efektif jika dikenakan kepada Negara sekutu ketimbang Negara musuh. Sanksi yang dikenakan kepada Negara musuh memang lebih sering terjadi, namun jarang sekali berhasil dalam sejarah penggunaannya, Alasannya, Negara musuh cenderung resisten terhadap sanksi karena mereka tidak mau Negara pengirim sanksi lebih kuat posisi tawarnya jika mereka patuh. Sebaliknya, sanksi yang dikenakan kepada Negara sekutu jarang sekali dilakukan namun cenderung berhasil. Alasannya, Negara sekutu tidak ingin kehilangan keuntungan dari hubungan yang sudah terjalin erat. Negara –Negara yang saling menjalin kemitraan perdagangan seringkali sangat berpotensi untuk tunduk pada tuntutan Negara pengirim sanksi. Terlebih lagi apabila Negara pengirim

sanksi merupakan Negara yang menjadi mitra dagang terbesar Negara target (McLean, 2010, p. 427).

2. Perbandingan Untung-Rugi Sanksi Ekonomi dengan Aksi Militer

Selama sejarahnya, Tiongkok yang terus berpegang teguh dengan politik luar negeri yang mana fokus terhadap kepentingan dan keamanan bagi Negaranya dalam lingkungan internasional, apabila ada Negara yang mengancam kepentingan tersebut Tiongkok tidak akan takut untuk menghukum Negara tersebut. Isu THAAD Korea Selatan merupakan salah satu contoh yang membawa ancaman terhadap keamanan Tiongkok. Demikian, sudah sewajarnya bagi Tiongkok untuk mengambil tindakan yang harus untuk melindungi kepentingan keamanannya.

Pada awalnya, pihak Tiongkok telah mengutarakan segala bentuk protes secara langsung terhadap pemerintah Korea Selatan terkait keputusan Korea Selatan untuk menggunakan sistem THAAD milik Amerika Serikat tersebut, namun Tiongkok menyadari sebatas protes yang di tunjukan tidak memberikan perubahan terhadap keputusan Korea Selatan akan THAAD. Tiongkok pada dasarnya telah menahan untuk diri untuk melakukan tindakan yang dapat memperpanjang konflik antara dua Negara, namun penempatan sistem THAAD yang terus beroperasi di tengah-tengah protes yang dilakukan Tiongkok menjadikan hal tersebut provokasi Korea Selatan untuk Tiongkok. Pemerintah Tiongkok pun, akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan untuk membalas Korea Selatan, yang mana dengan memberikan penekanan terhadap Negara tersebut. Penekanan

dilakukan oleh pihak Tiongkok sebagai bentuk strateginya agar dapat memberi dampak yang merugikan Korea Selatan karena telah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengancam kepentingan keamanan Tiongkok. Dengan kerugian yang dirasakan oleh Korea Selatan, pihak Tiongkok berharap dapat mendorong pemerintah Korea Selatan untuk memikirkan kembali keputusannya tersebut, juga berharap agar penempatan sistem THAAD dalam Negaranya dapat dibatalkan. Melihat kemampuan yang dimiliki Negaranya, pemerintah Tiongkok dipertimbangkan antara dua instrumen untuk strateginya, yaitu strategi penggunaan kekuatan militer dan penggunaan kekuatan ekonominya (Roy, 1998).

THAAD yang berhubungan dengan eksekusi kekuatan rudal balistik, membawa Tiongkok untuk melihat potensi apabila militer yang digunakan dalam strateginya. Tiongkok tumbuh menjadi negara yang sangat fokus dalam mengembangkan kekuatan militernya, sehingga terbukti kemajuan dan kemampuan teknis militer Tiongkok tiga kali lebih hebat bila dibandingkan dengan Korea Selatan. Sehingga bukan tidak mungkin bagi Tiongkok untuk membalas Korea Selatan menggunakan militer (Pike).

Selain militer, pemerintah Tiongkok juga mempertimbangkan apabila kekuatan ekonomi yang digunakan dalam strateginya. Diketahui bahwa, Tiongkok merupakan mitra perdagangan terbesar bagi Korea Selatan dalam beberapa tahun ini. Selama 25 tahun ini, hubungan ekonomi yang kuat telah menjadikan hubungan Tiongkok-Korea Selatan salah satu hubungan

bilateral paling penting di Asia dan di dunia. Pada 2015, omset perdagangan bilateral antara kedua Negara tercatat mencapai \$ 227,4 miliar dollar Amerika. Tiongkok juga merupakan pasar ekspor terbesar Korea Selatan. Korea Selatan mengekspor ke Tiongkok lebih dari negara lain di dunia, Tiongkok rata-rata menyumbang sekitar 25 persen dari ekspor tahunan Korea Selatan selama dekade terakhir. Pada 2016, ekspor Korea Selatan ke Tiongkok mencapai \$124 miliar, hampir dua kali lipat dari ekspor ke Amerika Serikat, pasar ekspor terbesar kedua Korea Selatan. Selain itu, Korea Selatan juga merupakan salah satu Negara yang paling banyak melakukan investasi langsung di Tiongkok (Tselichtchev, 2017). Demikian, Tiongkok sebagai yang mitra perdagangan terbesar Korea Selatan membuat Korea Selatan memiliki ketergantungan dalam hal ekonomi dengan Tiongkok, sehingga membuat Tiongkok mampu menggunakannya sebagai senjata dalam strateginya untuk menekan Korea Selatan.

Demi mencapai tujuan secara maksimal, pemerintah Tiongkok kemudian mempertimbangkan antara kedua instrumen tersebut yang memberikan lebih banyak keuntungan untuk Negaranya dan meminimalkan dampak bagi Negara namun secara bersamaan mampu memberi penekanan terhadap Korea Selatan untuk membatalkan keputusannya akan kebijakan THAAD. Berdasarkan asumsi dan fakta yang diperkirakan oleh Pemerintah Tiongkok, berikut perbandingan

keuntungan dan kerugian antara menggunakan aksi militer dengan sanksi ekonomi:

Tabel 1: Perbandingan Untung-rugi Aksi Militer dan Sanksi Ekonomi

Aksi Militer	Sanksi Ekonomi
<p><i>Benefits:</i></p> <ul style="list-style-type: none">○ Merusak kemampuan militer Korea Selatan○ Menunjukkan keseriusan dan kredibilitas Tiongkok○ Menghalangi proliferasi senjata nuklir.	<p><i>Benefits:</i></p> <ul style="list-style-type: none">○ Menjamin keamanan Negara serta warga Negara○ Melindungi keamanan militer Tiongkok○ Memperlihatkan kekuasaan Tiongkok terhadap Negara lain○ Lebih memberi dampak terhadap Negara target yang perekonomiannya dibawah Negara yang memberi.

<p><i>Costs:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembalasan langsung Korea Selatan terhadap Cina ○ Meningkatkan kemungkinan terjadinya perang senjata antar negara ○ Ketidakstabilan politik dan ekonomi global ○ Memberi gangguan dalam pasokan energi dan keamanan Negara. ○ Merusak reputasi global Tiongkok. 	<p><i>Costs:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Merugikan perdagangan Tiongkok ○ Merusak reputasi Tiongkok sebagai <i>supplier</i> yang dapat diandalkan dalam ekonomi global
--	---

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, keuntungan yang diberikan jika Tiongkok menggunakan aksi militer sebagai strateginya sangat tidak sebanding dengan kerugian yang akan didapatkan oleh Tiongkok. Walaupun dengan aksi militer, Tiongkok dapat menunjukkan keseriusannya menolak keberadaan THAAD terhadap Korea Selatan, Tiongkok yang juga memiliki kekuatan militer lebih dibanding Korea Selatan bisa dengan mudah membalas THAAD dengan rudal milik negaranya, namun hal tersebut akan menimbulkan kericuhan yang tidak diinginkan.

Pemerintahan Tiongkok telah mengatakan bahwa Militer Tiongkok mampu menghancurkan sistem Terminal High Altitude Area Defense

(THAAD) atau membuatnya "buta," begitu sistem milik Amerika Serikat tersebut dikerahkan di Korea Selatan. Menghancurkan THAAD akan sangat mudah bila melihat kemampuan militer, terlebih kekuatan rudal balistik yang dimiliki Tiongkok. Sebagaimana yang dikatakan oleh Peng Guangqian, ahli strategi militer di Tentara Pembebasan Rakyat atau *People's Liberation Army* (PLA) Akademi Ilmu Militer bahwa, menghancurkan sistem THAAD dapat dilakukan sepenuhnya oleh Tiongkok. Tiongkok bisa dengan mudah menghancurkannya dengan rudal balistik miliknya, atau juga dapat membuat THAAD tidak berguna melalui gangguan elektronik yang dapat mengganggu fungsi sistem THAAD. Namun, Song Zhongping, seorang pakar militer yang biasa bertugas di Korps Artileri menambahkan bahwa, walaupun dengan melawan THAAD dengan kekuatan rudal sendiri menunjukkan ke Korea Selatan keseriusan dan kredibilitas Tiongkok akan isu ini, namun itu merupakan sebuah pilihan yang akan menimbulkan lebih banyak kerusakan atau bahkan membawa ancaman lebih terhadap keamanan Tiongkok apabila Tiongkok mengambil keputusan untuk menghancurkan sistem radar THAAD. Jadi ini merupakan 'tindakan keras,' yang secara langsung melibatkan serangan (Sheng, Global Times News, 2017).

Adanya tindakan keras akibat aksi Militer yang dilakukan, pemerintah Tiongkok kemudian mempertimbangkan adanya potensi Korea Selatan untuk membalas Tiongkok secara langsung yang kemudian dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perang senjata antar kedua Negara. Dalam iklim globalisasi, perang akan menciptakan bencana yang lebih besar ketimbang

memperbaiki tatanan yang ada dan menimbulkan ketidakstabilan dunia internasional yang mana konflik akan aksi militer mengorbankan jiwa serta memancing kemarahan negara lain karena penderitaan manusia yang disebabkan oleh kekerasan. Tentu Tiongkok tidak ingin hal tersebut terjadi, adu militer juga dapat mengancam keamanan Negara Tiongkok sendiri, yang mana keamanan merupakan kepentingan nasional utama Tiongkok yang juga menjadi salah satu alasan kuat Tiongkok tidak ingin adanya THAAD di Korea Selatan. Terlebih lagi apabila Tiongkok menghancurkan THAAD dengan kekuatan militernya malah akan mengekspos kemampuan militernya lebih banyak kepada Amerika Serikat. Yang mana itu pada dasarnya merupakan alasan utama yang membuat Tiongkok menentangan keberadaan sistem THAAD milik Amerika Serikat di Korea Selatan. Tentu dengan begitu menggunakan kekuatan militer malah akan membawakan kerugian lebih banyak yang harus ditanggung oleh Negara (Sheng, 2017).

Selain itu, menggunakan aksi militer juga berpotensi untuk merusak reputasi global Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memegang posisi yang konsisten dan jelas dalam masalah penggunaan rudal, yang mana Tiongkok selalu menghindari penggunaan *hard power* terlebih lagi menggunakan kekuatan nuklir karena hanya akan merusak kepentingan keamanan Negara. Demikian, Pemerintah Tiongkok juga sejak dulu hanya menggunakannya instrumen tersebut untuk tindakan defensif. Tiongkok juga memiliki kebijakan nuklir “no first use”, bahwa tidak akan menjadi yang pertama meluncurkan senjata nuklir melawan musuh nuklir lainnya (Buckley, 2017).

Dalam politik luar negerinya Tiongkok juga terus menyerukan bahwa semua negara harus mengusahakan keamanan yang kooperatif, Sebagaimana juga yang dikatakan oleh juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Hong Lei, bahwa setiap negara harus mengingat kepentingan keamanan negara lain dan perdamaian serta stabilitas regional sambil mengejar kepentingan keamanannya sendiri (Tiongkok's Ministry of Foreign Affairs, 2015). Apabila Tiongkok menggunakan kekuatan militer, itu malah akan bertolak belakang dari prinsip politik luar negerinya selama ini dan akan membawa dampak terhadap reputasi global yang dibangun Tiongkok selama ini, sebagai Negara yang mengedepankan kedamaian.

Sehingga menggunakan instrumen militer bukanlah pilihan yang tepat bagi Tiongkok, terlebih lagi pemerintah Tiongkok mengetahui bahwa pihak Korea Selatan sendiri sepenuhnya menyadari kemampuan militer yang dimiliki Tiongkok, jadi tidak perlu bagi Tiongkok untuk melakukan tindakan atau gerakan militer ekstra yang malah berpotensi membahayakan kepentingan keamanan Tiongkok ketimbang memenuhi tujuannya.

Beda halnya dengan keuntungan dan kerugian yang diterima jika Tiongkok menggunakan sanksi ekonomi sebagai strateginya. Dalam kerugian yang diberikan, walau sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan dapat memberi dampak terhadap perdagangan Tiongkok itu sendiri, namun Tiongkok memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merupakan rekan perdagangan terbesar Korea Selatan alhasil dampak yang diberikan oleh sanksi ekonomi akan lebih dirasakan oleh Korea Selatan. Perekonomian

Tiongkok yang diatas Korea Selatan, menjadikan kerugian yang diterima Tiongkok tidak akan seimbang dengan Negara yang perekonomiannya dibawahnya sehingga sedikit kerugian bagi Tiongkok bukanlah hal besar, asalkan Korea Selatan lebih banyak menerima kerugian tersebut. Menurut data dari *World Trade Organization* atau WTO, rincian total ekspor ekonomi Korea Selatan menunjukkan bahwa Tiongkok menguasai 26,1% dari ekspor Korea Selatan. Dengan impor ke Korea Selatan, Tiongkok juga nomor satu di 16,1%. Sebaliknya, ketergantungan Tiongkok pada ekspor dari Korea Selatan telah menurun sejak 2014, data tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok tidak tergantung pada Korea Selatan karena perekonomian Tiongkok lebih besar dibanding Korea Selatan (Denney, 2015).

Sehingga menggunakan sanksi ekonomi sebagai senjatanya tidak akan menyakiti perekonomian Tiongkok lebih dari Korea Selatan. Dalam iklim globalisasi, adanya ketergantungan ekonomi memberikan keuntungan bagi pelaksanaan sanksi ekonomi, semakin tergantung suatu Negara dengan Negara lain maka akan semakin rapuh Negara tersebut.

Sanksi Ekonomi juga merupakan tindakan yang lebih aman untuk diambil pemerintah Tiongkok, yang mana menjamin keamanan Negara dan warganya serta melindungi keamanan militer Tiongkok. Sanksi ekonomi sesuai dengan definisinya merupakan instrumen Negara yang dianggap sebagai strategi moderat, yang mana dilakukan Negara untuk membuat Negara target berkompromisi dengan hendak Negeranya namun tidak melibatkan kekerasan atau kekuatan militer sehingga aman untuk digunakan dan tidak berpotensi

mengancam keamanan Negaranya. Sebagai instrumen politik luar negeri yang aman digunakan, sanksi ekonomi diperkirakan oleh pemerintah Tiongkok dapat menekan Korea Selatan untuk tunduk dengan kepentingan Tiongkok terkait THAAD tanpa memberikan dampak yang mengancam kepentingan keamanan Negaranya. Demikian, Pemerintah Tiongkok pun akhirnya memilih strategi penggunaan kekuatan ekonomi yang dinilai lebih minim dampaknya terhadap Tiongkok (Rosyidin, 2016).

C. Implikasi Sanksi Ekonomi Tiongkok Terhadap Korea Selatan

Menerapkan sanksi ekonomi kepada Negara yang berkonflik dengannya, bukanlah sesuatu yang asing bagi Tiongkok. Sebuah kenyataan bahwa Tiongkok telah menjadi negara tiran perdagangan dalam hubungan dagang internasional, dengan adanya fakta tersebutlah yang menjadi salah satu alasan Tiongkok kerap menggunakan kapabilitas ekonominya kepada Negara yang sedang berkonflik dengannya. Dalam dekade terakhir, Tiongkok telah menghukum negara-negara yang merusak klaim teritorial dan tujuan kebijakan luar negeri dengan menggunakan sanksi ekonomi, langkah-langkah yang dilakukan seperti membatasi perdagangan, mendorong boikot populer, dan memotong pariwisata. Tindakan-tindakan ini telah menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan dan Langkah-langkah ini juga terbukti memiliki efek jangka panjang dalam menghalangi dan membentuk kepentingan kebijakan luar negeri negara-negara yang perekonomiannya dibawah Tiongkok (Harrell, 2018, p. 2).

1. Sanksi Ekonomi Tiongkok Secara Umum

Sebagai Negara dengan perekonomian besar, Sanksi Ekonomi Tiongkok memiliki karakteristiknya yang membuat sanksi ekonomi cenderung lebih memberikan kerugian yang fatal bagi Negara yang ditujunya. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari Alat dan ciri khas dalam mengimplemetasikan sanksi ekonominya. Sejak 2010, Tiongkok mengandalkan berbagai alat untuk mengimplementasikan tindakan sanksi ekonominya. Secara umum, alat-alat ini terbagi dalam dua kategori utama: pembatasan masuk dan pembatasan keluar. Yang pertama membatasi akses asing ke pasar Tiongkok, termasuk menekan perusahaan asing perorangan atau mendorong konsumen Tiongkok untuk menolak barang dari negara-negara sasaran. Kategori yang terakhir melibatkan pemotongan negara-negara yang menjadi target dari Tiongkok.

Dalam kategori pembatasan masuk merupakan pembatasan impor. Berbagai kasus tindakan sanksi ekonomi Tiongkok melibatkan pembatasan impor produk asing ke Tiongkok. Dalam menerapkan pembatasan impor, Tiongkok pada umumnya menargetkan produk yang dapat menjadi sumber pemasok alternatif atau yang diproduksi Tiongkok di dalam negeri. Tiongkok belum memberlakukan pembatasan pada produk, seperti bagian komponen untuk barang-barang manufaktur, ketika melakukan hal itu dapat berdampak buruk bagi perusahaan Tiongkok, bahkan ketika pembatasan tersebut dapat membebankan biaya ekonomi yang signifikan pada target. Kemudian tidak hanya membatasi impor produk asing, Tiongkok juga

melakukan boikot. Boikot yang dilakukan Tiongkok memainkan peran penting dalam keberhasilan sanksi ekonomi Tiongkok. Boikot berbeda dengan pembatasan impor dalam beberapacara. Pertama, boikot dapat menargetkan produk bermerek asing yang diproduksi di Tiongkok, serta barang impor. Kedua, pembatasan impor umumnya mencakup beberapa tindakan hukum atau peraturan, seperti inspeksi keamanan pangan yang ditargetkan, di mana boikot mencakup panggilan publik agar konsumen tidak membeli barang yang ditargetkan, tetapi tanpa langkah hukum atau peraturan (Harrell, 2018, pp. 15-16).

Alat lain yang digunakan dalam sanksi ekonomi Tiongkok adalah, pembatasan investasi serta memberi penekanan terhadap perusahaan khusus. Dalam hal ini adalah, Tiongkok akan fokus memberi pembatasan terhadap perusahaan yang menjadi sumber perekonomian terbesar dalam Negara yang berkonflik dengannya untuk merugikan kegiatan ekonomi mikronya, kepentingan finansial maupun komersial yang berada di Tiongkok atau sektor yang mengandalkan perdagangan dengan Tiongkok, sehingga akan menjadi penekan yang memberi kerugian ekonomi sangat besar (Harrell, 2018, p. 16).

Kemudian dalam kategori pembatasan luar dari sanksi ekonomi Tiongkok merupakan, pembatasan ekspor. Pada dasarnya jarang bagi Tiongkok untuk menetapkan pembatasan ekspor produk-produk Negeranya, dikarenakan Negara ingin mempertahankan reputasinya sebagai pemasok barang dan jasa yang dapat diandalkan dalam pasar global daripada

mendorong negara-negara lain untuk mendiversifikasi rantai pasokan dari Tiongkok namun di kasus-kasus tertentu, Tiongkok bisa saja menetapkan pembatasan ekspor dalam sanksi ekonominya terhadap Negara lain. Selain pembatasan ekspor, Tiongkok juga melakukan pembatasan terhadap pariwisatanya. Melakukan pembatasan terhadap pariwisata merupakan alat sanksi ekonomi Tiongkok yang memiliki hasil signifikan terhadap ekonomi Negara sasaran sanksinya, mengingat bahwa turis Tiongkok sekarang adalah wisatawan luar negeri dengan pengeluaran terbesar di dunia. Pembatasan pariwisata bagi Tiongkok juga juga dapat memberikan kerugian pada pendapatan Negara sasarnya dengan sedikit kerugian biaya terhadap Tiongkok (Harrell, 2018, p. 17).

Dalam implementasinya, sanksi ekonomi Tiongkok memiliki ciri khas yang informal. Walau dipandang sebagai kebijakan luar negerinya, namun sampai saat ini, Tiongkok belum mengembangkan kerangka kerja formal, hukum atau peraturan untuk tindakan sanksi ekonominya tersebut, kemudian dilaksanakan tanpa undang-undang yang formal dan terbatas dalam hal pengaplikasian, cakupan serta durasi. Tiongkok sangat bergantung pada mekanisme informal seperti kontrolnya terhadap media dan perusahaan milik negara dan penerapan selektif peraturan domestik. Informalitas ini memberikan tindakan sanksi ekonomi yang dilakukan Tiongkok memiliki tingkat penyangkalan yang masuk akal. Sanksi ekonomi Tiongkok yang cenderung tidak kentara, bersifat unilateral, tidak diumumkan secara resmi membuat pemerintah Tiongkok selalu tidak mengakui telah menerapkan

sanksi ekonomi tersebut namun membuat negara-negara target sadar akan maksud dari tindakan sanksi ekonominya melalui waktu dan pesan pribadi mereka. Penyangkalan yang masuk akal ini juga memberi Tiongkok wewenang untuk mengangkat sanksi ekonomi mereka kapan saja. Karena Tiongkok tidak secara formal menerapkan langkah-langkah sanksi ekonomi tersebut terhadap Negara sasaran yang berkonflik dengannya, sehingga Tiongkok dapat mengurangi atau menghentikannya bahkan ketika itu hanya mencapai sebagian penyelesaian yang sukses (Harrell, 2018, p. 19).

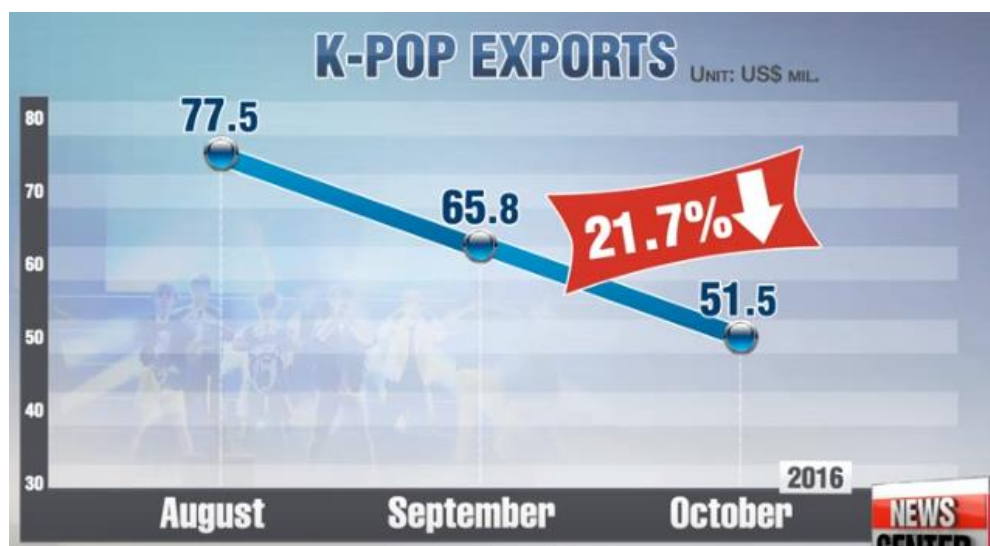
2. Sanksi Ekonomi Tiongkok Di Korea Selatan

Tiongkok mulai menerapkan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan, pada awal Agustus 2016. Pemerintah Tiongkok menerapkan sanksi ekonomi tidak hanya terhadap distributor tetapi juga terhadap semua konten budaya Korea, yang dikenal sebagai *Korean Wave*, seperti film, drama, pertunjukan, dan iklan. *Korean Wave* adalah salah satu kekuatan pendorong untuk mendukung kemajuan industri Korea Selatan. Tiongkok yang telah menjadi salah satu konsumen top *Korean Wave* sejauh ini, namun dengan adanya sanksi ekonomi, Tiongkok mulai melarang segala jenis *entertainment* asal Korea Selatan dalam Negara, yang mana membatalkan penampilan musik Korea, seperti konser atau pertunjukan, termasuk musik klasik dan musikal, dibatalkan. Melarang masuknya bintang televisi asal Korea Selatan ke dalam Negara, terlebih lagi Tiongkok juga menarik semua bintang televisi negaranya yang sedang beraktivitas di Korea Selatan. Acara-acara TV yang berasal dari Korea Selatan seperti webtoon, drama,

dan film, diblokir di situs web milik Tiongkok, perusahaan – perusahaan televisi kabel Tiongkok juga melakukan blokir terhadap stasiun TV Korea Selatan (Kwon, 2017, p. 2).

Pada akhir 2016 hingga awal 2017, Tiongkok mulai melarang segala jenis penjualan musik pop Korea (Kpop) dalam Negara serta pembatalan penampilan seniman-seniman asal Korea Selatan di Tiongkok yang kemudian di gantikan dengan seniman dalam negeri. Pada Februari 2017, Tiongkok akhirnya secara resmi memblokir situs yang digunakan untuk mengakses musik Korea (Allkpop News, 2017). Sanksi juga di berlakukan bagi perusahaan yang melanggar dan tetap menggelar konser di Tiongkok berupa denda sebesar 17 juta won atau 195 juta rupiah oleh pemerintah Tiongkok (CNN Indonesia, 2016).

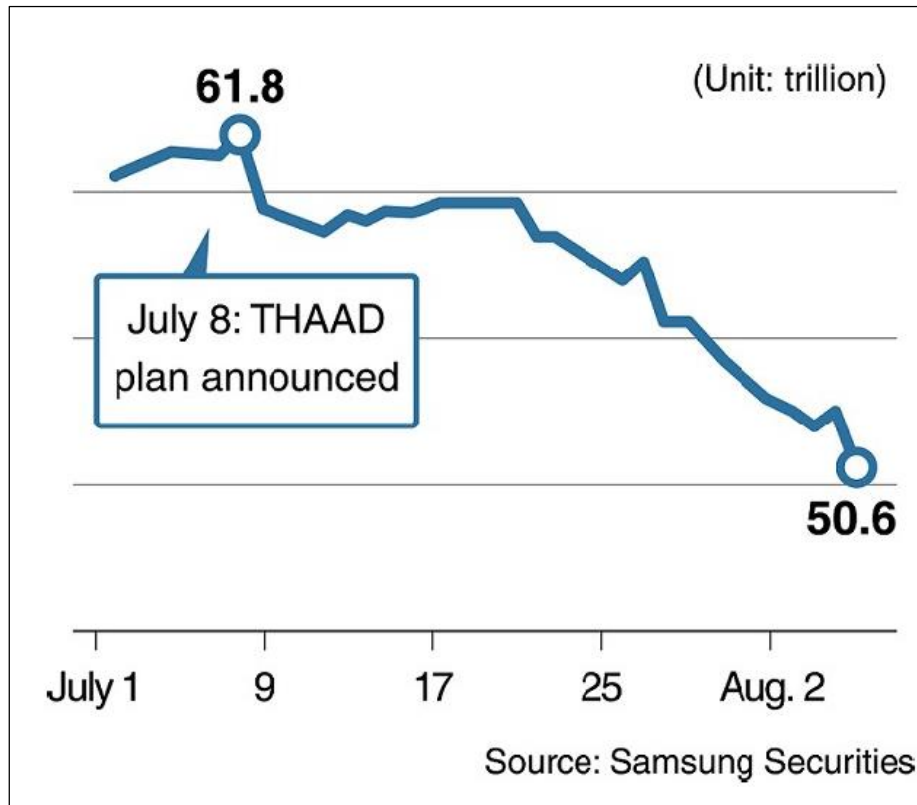
Gambar 3: Grafik Dampak Sanksi Ekonomi Tiongkok Bagi Korean Wave



Sumber: (Arirang News, 2016)

Kemudian pada Januari 2017, adanya larangan terhadap industri kosmetik dan makanan asal Korea Selatan. Banyak makanan dan kosmetik Korea Selatan yang biasa di ekspor ke Tiongkok tidak diizinkan untuk diimpor kedalam Negara, akibatnya bisnis kosmetik asal Korea Selatan mengalami penurunan. Terhitung sebanyak 83 dari 466 barang kosmetik yang dilarang diimpor ke Tiongkok berasal dari Korea Selatan. Beberapa produk kosmetik dari Korea Selatan yang mendapatkan penolakan izin impor oleh Tiongkok terdiri dari 28 merk kosmetik, beberapa produk tersebut meliputi lotion, masker, produk pembersih tubuh. Selain mendapat penolakan izin impor dari pemerintah Tiongkok, toko-toko yang menjual kosmetik asal Korea Selatan juga mulai tidak menjual kosmetik Korea Selatan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemerintah Tiongkok bahwa, walaupun penjualan berbagai macam kosmetik asal Korea Selatan sangat populer dikalangan masyarakatnya namun orang-orang Tiongkok memiliki pikiran yang jernih tentang situasi yang terjadi akibat THAAD di Korea Selatan sehingga tidak akan mengorbankan kepentingan nasional untuk kosmetik Korea Selatan (Ja-young, 2017). Ekspor makanan dari Korea Selatan juga mengalami penurunan karena adanya aksi boikot ini penurunan itu sebesar 5,6 persen.

Gambar 4: Grafik Dampak Sanksi Ekonomi Tiongkok terhadap Ekspor Kosmetik dan Makanan asal Korea Selatan



Sumber: <http://www.koreaherald.com>

Secara keseluruhan dampak yang didapatkan oleh Korea Selatan akibat sanksi ekonomi Tiongkok terhadap industri kosmetik dan makanannya bisa dilihat dari Grafik laporan diatas, yang mana menunjukkan adanya penurunan harga saham milik Perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang berhubungan dengan konsumsi kosmetik dan makanan di Tiongkok setelah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan menggunakan sistem THAAD (Herald Corporation, 2016).

Mobil keluaran Korea Selatan bermerk KIA dan Hyundai juga mengalami penurunan penjualan di Tiongkok pada tahun 2017 akibat sanksi ekonomi yang dilakukan Negara, yang mana Tiongkok membatasi pembelian mobil asal Korea Selatan yaitu Hyundai dan Kia. (Ethan Meick, 2017, p. 7). Hyundai Motor dan afiliasinya Kia Motors, keduanya merupakan perusahaan pembuat mobil terbesar kelima di dunia. Sebagian besar penjualan luar negerinya di konsumsi oleh Tiongkok, namun setelah Tiongkok menetapkan sanksi ekonomi kedua perusahaan tersebut melaporkan penurunan penjualannya di Tiongkok pada tahun 2017 (Jung-a, 2017). Hyundai mengalami penurunan penjualan sebesar 42 persen pada penjualan luar negeri di bulan Maret 2017. Penjualan luar negeri Kia juga mengalami penurunan sebesar 54 persen (Tom Hancock, 2017).

Gambar 5: Penurunan Penjualan Perusahaan Mobil Hyundai dan Kia di Tahun 2017



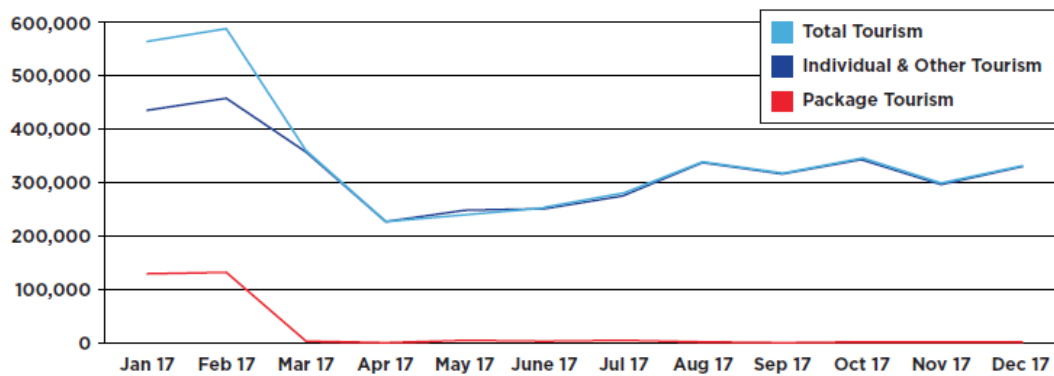
Sumber: <https://www.ft.com>

Tiongkok juga melarang segala aktifitas yang berhubungan dengan *Tourism*. Wisatawan asal Tiongkok merupakan salah satu elemen penting bagi pariwisata Korea Selatan, intensitas pengunjung asal Tiongkok secara ekonomi membuat pendapatan Korea Selatan di bidang pariwisata menjadi menguntungkan, angka pengunjung yang merupakan wisatawan asal Tiongkok mencapai 47% dari jumlah wisatawan yang mengunjungi Korea Selatan (Gibson, 2017). Pada tanggal 2 Maret 2017, Administrasi Pariwisata Nasional Tiongkok (CNTA) mengeluarkan tujuh pedoman tentang perjalanan ke Korea Selatan. Isi dari Pedoman tersebut mencakup beberapa larangan penjualan paket liburan ke Korea Selatan. Pemerintah Tiongkok telah membatasi tur kelompok ke Korea Selatan dengan memerintahkan agen wisata untuk mengurangi skala tur dan berhenti untuk mengirim paket tur wisata ke Korea Selatan. Pemerintah Tiongkok juga menolak untuk mengizinkan grup tambahan dan tur personal asal Korea Selatan ke Tiongkok. Pemerintah menyatakan akan ada hukuman jika para agen melanggar pedoman tersebut (Kwon, 2017, p. 4). Pada awalnya, larangan ini ditujukan hanya untuk agen wisata yang berlokasi di Beijing, tetapi larangan itu kemudian berlaku bagi seluruh agen wisata di Tiongkok. Pada Juni 2017, Tiongkok juga mulai tidak mengizinkan penerbangan pesawat antara kedua Negara menggunakan Jeju Air, Asiana, and Jin Air (Ethan Meick, 2017).

Setelah pemerintah menerapkan sanksi ekonomi dengan membatasi wisatawan Negeranya untuk mengunjungi Korea Selatan, terjadi penurunan

pemasukan untuk Negara yang berasal dari bidang wisata. Wisatawan dari Tiongkok pada tahun 2017 semakin mengalami penurunan sehingga tercatat pada tahun tersebut hanya berjumlah 4.169.353 Jiwa (Harrell, 2018).

Gambar 6: Data Penurunan Wisatawan Tiongkok ke Korea Selatan



Sumber: Peter Harrel (2018) Tiongkok's Use of Coercive Economic Measures.

Bisa dilihat dari gambar diatas bahwa, penurunan wisatawan dari Tiongkok pada tahun 2017 sangat drastik. Januari dan 2017, sebelum Tiongkok menerapkan sanksi ekonomi terhadap industry wisata Korea Selata, tercatat jumlah wisatawan Tiongkok berjumlah 500,000 lebih jiwa. Namun terjadi penurunan setelah adanya sanksi ekonomi untuk membatasi wisatawan Negeranya untuk mengunjungi Korea Selatan pada bulan Maret dan seterusnya. Data di bulan juni 2017 wisatawan asal Tiongkok yang mengunjungi Korea Selatan sejumlah 200,000 lebih, jumlah ini cukup jauh jika di dibandingkan dengan data jumlah wisatawan Tiongkok di bulan juni 2016 yang berjumlah 758.534, terjadi penurunan sejumlah 66%. Berdasarkan data dari Organisasi Pariwisata

Korea Selatan menunjukkan bahwas, berkurangnya jumlah wisatawan lebih dari setengah dalam tujuh bulan pertengahan tahun 2017 dibandingkan tahun lalu, menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh Korea Selatan sebesar 5,1 miliar Dollar Amerika (Kwon, 2017).

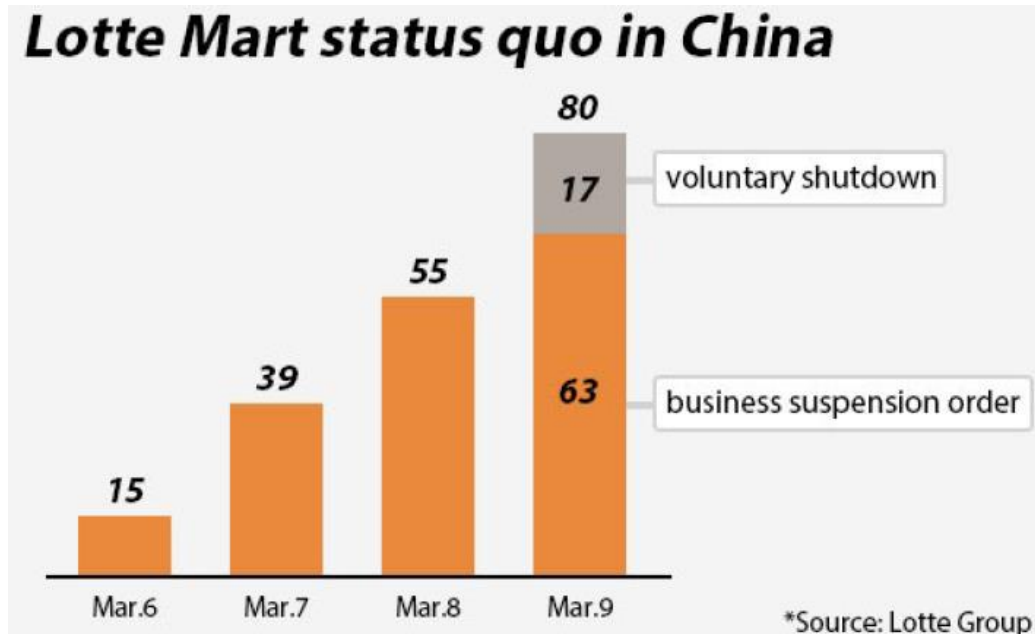
Yókè adalah kata Mandari yang berarti turis, Yókè secara umum dikenal sebagai sekelompok wisatawan yang mengunjungi Korea Selatan dari Tiongkok. Wisatawan Tiongkok menempati nomor satu sebagai wisatawan yang paling banyak mengunjungi Korea Selatan, maka dari itu industry wisata memiliki ketergantungan pelanggan terhadap para Yókè sebesar 78%, penjualan terhadap Yókè di tahun 2016 lalu bahkan mengambil sekitar 71,8%. Sejak tahun 2010, peningkatan yang konsisten dari Yókè meningkatkan bobot industri wisata dan meningkatkan pemasukan untuk Negara. Saat ini, ada dua Hotel yang menjadi pemegang pemasukan nomor satu dan dua bagi Negara dalam bidang Industri adalah Hotel Lotte Corporation (48,7%) dan Hotel Silla (27,2%). Setiap tahun, Yókè merupakan konsumen yang paling banyak menggunakan jasanya, 59,4% konsumen Hotel Lotte adalah Yókè dan 67% konsumen Hotel Silla adalah Yókè. Sehingga kedua Hotel tersebut sangat bergantung pada konsumsi para Yókè. (Kwon, 2017, p. 3).

Kemudian penurunan jumlah Yókè juga berdampak terhadap pendapatan pariwisata Korea Selatan melalui pulau Jeju, yang merupakan pulau paling wisata nomor satu di Korea Selatan. Menurut data dari Asosiasi Pariwisata Jeju, jumlah wisatawan Tiongkok memang turun setelah adanya sanksi ekonomi Tiongkok. Asosiasi itu juga mengatakan bahwa dari 15-18 Maret, jumlah

wisatawan Tiongkok yang tiba di pulau itu turun 15.577, penurunan 46 persen dibandingkan dengan waktu yang sama pada tahun 2016 lalu (Gibson, 2017). Penjualan bisnis di Jeju mengurang setiap bulannya, Hotel-hotel di pulau tidak sepi biasanya, dan tarif pemesanan dari wisatawan Tiongkok menjadi 0%. Selain itu, menurunnya *Yókè* di pulau Jeju, membuat berbagai investor asing Tiongkok menarik investasinya di pulau tersebut, seperti Hanwha Galleria milik Tiongkok yang memutuskan untuk mengembalikan hak bisnis bebas pajak dengan bandara pulau Jeju pada bulan Agustus 2017. Diperkiraan jika keadaan wisatawan dari Tiongkok terus menurun, pihak wisatawan asal pulau Jeju mengatakan bahwa kerugian bisa mencapai 2 triliun won (Kwon, 2017, p. 1).

Terlebih lagi Lotte Corporation yang merupakan salah satu perusahaan terbesar milik Korea Selatan juga perusahaan yang menyediakan tanah untuk penempatan sistem THAAD di Korea Selatan, ditutup sementara oleh pemerintah Tiongkok (Hutchinson, 2016, p. 15). Penutupan yang dilakukan Tiongkok, merupakan salah satu implikasi sanksi ekonomi namun juga sebagai tindakan untuk melindungi kepentingan keamanannya. Perusahaan Lotte yang menyediakan lahan untuk penempatan sistem THAAD bagi Tiongkok masuk sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya sehingga penutupan pun dilakukan oleh pemerintah Tiongkok yang telah memberi peringatan bahwa, keputusan penempatan di wilayah milik perusahaan Lotte dapat berubah menjadi mimpi buruk bagi pihak Korea Selatan (Mullen, 2017).

Gambar 7: Keadaan Toko Milik Perusahaan Lotte di Tiongkok setelah diterapkan Sanksi Ekonomi



Sumber: Lotte Corporation

Tiongkok mulai mengambil langkah penutupan Perusahaan Lotte pada bulan Februari dan Maret 2017, berdasarkan data perusahaan yang diliput oleh Yonhap News, 90% dari 99 toko penyalur Lotte Mart di Tiongkok berhenti beroperasi, 63 diantaranya ditutup paksa dengan alasan inspeksi, 17 lainnya dikarenakan adanya tekanan dari gerakan anti-korea yang dilakukan oleh beberapa warga Tiongkok yang memiliki nasionalisme kuat. Sehingga dalam 4 hari 80 toko telah ditutup (Habiburrahman, 2017, p. 11). Pada bulan November 2017, setelah toko-toko milik Lotte di tutup, Tiongkok juga menutup sementara lebih dari 150 pabrik, fasilitas penyimpanan, dan toko afiliasi milik perusahaan Lotter, termasuk *Lotte Corporation Confectionery*, *Lotte Corporation Chemical*.

Kemudian JD.com, situs toko online terbesar kedua di Tiongkok, memutuskan untuk menutup bagian yang didedikasikan untuk produk Lotte Corporation Mart. Pada hari juga pemerintah Tiongkok menurup akses terhadap situs web Lotte Corporation di Tiongkok. Pada bulan Desember, pihak berwenang Tiongkok juga menghentikan proyek konstruksi 3 triliun won (\$2,6 miliar) untuk Lotte Corporation World Town di kota timur laut Shenyang (Kwon, 2017, p. 7). Pada saat itu perusahaan milik Tiongkok bernama Hershey yang sedang dalam tahap kerjasama dengan perusahaan Lotte dalam hal pembangunan pabrik coklat di Tiongkok pun diberhentikan oleh pihak Hershey karena adanya sanksi ekonomi oleh pemerintah Tiongkok (Ethan Meick, 2017, p. 7).

Selain perusahaan Lotte, Tiongkok juga memberi pelarang terhadap beberapa barang dari perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan, seperti LG dan Samsung, yang mana LG Chem dan Samsung SDI dikeluarkan dari daftar pemasok baterai-listrik yang disetujui oleh Tiongkok. Sebagai Salah satu perusahaan besar di Korea Selatan, perusahaan Lotte yang telah menginvestasikan lebih dari 5 miliar Dollar Amerika dalam operasinya di Tiongkok sejak 1994. Bisnis Lotte Corporation menjangkau berbagai industri termasuk makanan, hotel, bahan kimia, dan *real estate*. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 25.000 orang di Tiongkok, pasarnya di Tiongkok terhitung kurang dari 30% dari penjualannya di luar Korea Selatan (Mullen, 2017).

Pada akhir Juni 2017 setelah Tiongkok menerapkan sanksi ekonominya, penjualan bisnis perusahaan Lotte mengalami kerugian sekitar 350 miliar won

dikarenakan penjualan di Tiongkok turun 35% dibandingkan dengan tahun lalu. Pihak Lotte menyatakan bahwa jika situasi tidak berubah dalam rentang waktu tiga bulan maka Lotte akan mengalami kerugian yang dapat mencapai 300 milyar Won atau setara dengan 264 juta dollar Amerika. Kemudian apabila dikombinasikan dengan semua kerugian baik itu terkait penjualan makanan dan segala jenis layanan yang di sediakan Lotte makan kerugian tersebut dapat mencapai 500 Milyar Won, kemudian jika situasi tetap bertahan hingga akhir tahun 2017 maka kerugian yang di tanggung oleh Lotte dapat mencapai 2,5 Trilyun Won (Yonhap News, 2017).

Menurunnya ekspor kosmetik serta penurunan jumlah wisatawan dari Tiongkok sejauh ini membuktikan bahwa sanksi ekonomi Tiongkok telah membatasi ruang gerak Korea Selatan dalam menjangkau pasar terbesarnya. Secara keseluruhan sanksi ekonomi Tiongkok tercatat membawa kerugian besar terhadap perekonomian Korea Selatan, seperti yang dinyatakan dalam laporan oleh Hyundai Research Institute jumlah kerusakan yang disebabkan dengan adanya sanksi ekonomi Tiongkok lebih banyak memberi dampak terhadap Korea Selatan. Korea Selatan diperkirakan telah mencapai kerugian lebih dari 7,5 miliar dollar Amerika pada tahun 2017, sementara Tiongkok sendiri mendapatkan kerugian lebih sedikit dibandingkan Korea Selatan, yaitu sebesar 880 juta Dollar Amerika. Demikian Tiongkok adalah pasar penting bagi Korea Selatan, sanksi ekonomi yang diberikan oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan atas penempatan sistem THAAD tercatat telah memberikan

kerusakan terhadap pertumbuhan perekonomian Korea Selatan yang tidak bisa diabaikan.